



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3459442; FAKSIMILE (021) 3459443; SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- **101** /PK/2015
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Laporan Realisasi APBD Triwulan I Tahun 2015
dan Laporan Realisasi APBD Tahun 2014 (*unaudited*)

31 Maret 2015

Yth. Gubernur, Bupati, dan Walikota
di seluruh Indonesia

Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Nasional, Kementerian Keuangan menghimpun Informasi Keuangan Daerah. Pada periode ini diperlukan Laporan Realisasi APBD Triwulan I Tahun 2015 dan Realisasi APBD Tahun 2014 (*unaudited*) dari seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diharapkan Saudara dapat menyampaikan laporan dimaksud dalam **format sebagaimana terlampir** paling lambat tanggal **30 April 2015** yang dialamatkan kepada:

**Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
c.q. Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung Radius Prawiro Lantai 8, Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta Pusat 10710**

Bersamaan dengan penyampaian laporan kepada alamat sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten dan Kota agar **menyampaikan juga laporan dimaksud kepada Pemerintah Provinsi masing-masing.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Evaluasi Pendanaan
dan Informasi Keuangan Daerah



(Adjianto)

NIP 19580323 198703 1 001 *L*

PROVINSI / KABUPATEN / KOTA		
LAPORAN REALISASI APBD s.d. TRIWULAN I		
TAHUN ANGGARAN 2015		
Nomor Urut	Uraian	Realisasi s.d. Triwulan I (Januari-Maret)
4	PENDAPATAN	
4.1	PAD	
4.1.1	Pajak daerah	
4.1.2	Retribusi daerah	
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	
4.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	
4.2.2.2	Dana Penyesuaian	
4.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	
4.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	
4.2.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	
4.2.4.1	Pendapatan Hibah	
4.2.4.2	Pendapatan Dana Darurat	
4.2.4.3	Pendapatan Lainnya	
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	
5.1.1	Belanja Pegawai	
5.1.2	Belanja Barang	
5.1.3	Belanja Bunga	
5.1.4	Belanja Subsidi	
5.1.5	Belanja Hibah	
5.1.6	Belanja Bantuan sosial	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	
5.2	BELANJA MODAL	
5.2.1	Tanah	
5.2.2	Peralatan dan Mesin	
5.2.3	Gedung dan Bangunan	
5.2.4	Jalan, irigasi dan jaringan	
5.2.5	Aset tetap lainnya	
5.2.6	Aset lainnya	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	
5.3.1	Belanja tidak terduga	
5.4	TRANSFER	
5.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	
5.4.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa	
5.4.3	Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kota/Desa	
5.4.4	Transfer Lainnya ke Kab/Kota/Desa	
	BELANJA DAN TRANSFER	
	SURPLUS/DEFISIT	
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
6.1.1	Penggunaan SILPA	
6.1.2	Pencairan dana cadangan	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	
		Daerah, tanggal Kepala
		Tanda tangan & Stempel
		Nama
		NIP

PROVINSI / KABUPATEN / KOTA		
LAPORAN REALISASI APBD		
TAHUN ANGGARAN 2014 (UNAUDITED)		
Nomor Urut	Uraian	Realisasi
4	PENDAPATAN	
4.1	PAD	
4.1.1	Pajak daerah	
4.1.2	Retribusi daerah	
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	
4.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	
4.2.2.2	Dana Penyesuaian	
4.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	
4.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	
4.2.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	
4.2.4.1	Pendapatan Hibah	
4.2.4.2	Pendapatan Dana Darurat	
4.2.4.3	Pendapatan Lainnya	
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	
5.1.1	Belanja Pegawai	
5.1.2	Belanja Barang	
5.1.3	Belanja Bunga	
5.1.4	Belanja Subsidi	
5.1.5	Belanja Hibah	
5.1.6	Belanja Bantuan sosial	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	
5.2	BELANJA MODAL	
5.2.1	Tanah	
5.2.2	Peralatan dan Mesin	
5.2.3	Gedung dan Bangunan	
5.2.4	Jalan, irigasi dan Jaringan	
5.2.5	Aset tetap lainnya	
5.2.6	Aset lainnya	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	
5.3.1	Belanja tidak terduga	
5.4	TRANSFER	
5.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	
5.4.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa	
5.4.3	Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kota/Desa	
5.4.4	Transfer Lainnya ke Kab/Kota/Desa	
	BELANJA DAN TRANSFER	
	SURPLUS/DEFISIT	
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
6.1.1	Penggunaan SILPA	
6.1.2	Pencairan dana cadangan	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	
		Daerah, tanggal Kepala
		Tanda tangan & Stempel
		Nama NIP